

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN DISERTASI	ix
DISSERTATION SUMMARY	xxxv
KATA PENGANTAR	lix
DAFTAR ISI	lxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	15
1. Rekonstruksi	15
2. Konsep <i>E-Commerce</i>	17
3. Konsep Sengketa <i>E-Commerce</i>	21

4.	Konsep Penyelesaian Sengketa <i>E-Commerce</i>	23
5.	Konsep Keadilan.....	25
F.	Kerangka Teori	33
1.	<i>Grand Theory</i> (Teori Utama): Teori Keadilan.....	34
a.	Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam.....	35
b.	Teori Keadilan Pancasila	37
c.	Teori Keadilan Aristoteles	40
d.	Keadilan J.S Mill	43
e.	Keadilan Sosial John Rawls.....	45
2.	<i>Middle Range Theory</i> : Teori Penyelesaian Sengketa	56
3.	<i>Middle Range Theory</i> : Teori Alternatif Penyelesaian Sengketa	59
4.	<i>Applied Theory</i> : Teori Konflik	66
5.	<i>Applied Theory</i> : Teori Perlindungan Konsumen	70
G.	Kerangka Pemikiran.....	73
H.	Metode Penelitian	74
1.	Paradigma Penelitian	74
2.	Metode Pendekatan.....	79
3.	Spesifikasi Penelitian.....	80
4.	Sumber dan Jenis Data.....	81
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	83
6.	Teknik Analisis Data.....	83
I.	Sistematika Penulisan Disertasi	85
J.	Orisinalitas/Keaslian Penelitian	89

BAB II KAJIAN PUSTAKA	93
A. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Transaksi <i>E-commerce</i>	93
1. Perjanjian Pada Umumnya.....	93
2. Tinjauan Umum tentang <i>E-commerce</i>	97
3. Pengertian <i>E-commerce</i>	100
4. Sejarah <i>E-commerce</i>	112
5. Transaksi <i>E-commerce</i>	113
6. Wanprestasi Dalam <i>E-commerce</i>	131
7. Transfer Dana Secara Elektronik	132
8. Perkembangan <i>E-commerce</i>	134
B. Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	141
1. Peraturan Perlindungan Konsumen Di Indonesia	142
2. Sejarah Gerakan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.....	144
3. Konsep Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	148
a. Pengertian Perlindungan Konsumen	148
b. Pengertian konsumen dan pelaku usaha.....	153
c. Tinjauan terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha..	156
d. Tinjauan Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	161
C. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi <i>E-commerce</i>	164

D. Pengaturan Hukum Dalam Melakukan Perdagangan Secara Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	180
E. Lembaga Penyelesaian Konflik (Sengketa Hukum)	191
1. Pengertian Konflik (Sengketa Hukum).....	191
2. Cara Menyelesaikan Konflik (Sengketa Hukum)	194
3. Yang Berwenang Melakukan Penyelesaian Konflik (Sengketa Hukum) di Indonesia	200
a. Lembaga Litigasi	200
b. Lembaga Non Litigasi	205
4. Sejarah dan Perkembangan Penyelesaian Konflik (Sengketa Hukum)....	206
a. Sejarah Penyelesaian Konflik (Sengketa Hukum) Dalam Sistem Hukum Indonesia	206
b. Perkembangan Pengaturan	208
c. Penyelesaian Sengketa Perdata Sepenuhnya Merupakan Haknya Para Pihak	209
d. Pengertian Arbitrase	210
e. Latar Belakang Sejarah Arbitrase di Indonesia.....	211
f. Sumber Hukum dan Landasan Umum Arbitrase	215
g. Prinsip-Prinsip Umum Arbitrase	221
h. Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase	226
i. Jenis-Jenis Arbitrase.....	231
j. Klausula Arbitrase	233

k. Kewenangan Absolut Arbitrase.....	236
F. Penyelesaian Sengketa Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Islam.....	238
BAB III Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) Saat Ini	251
A. Bisnis Toko Online Dalam Transaksi <i>E-commerce</i> Saat Ini	251
1. OLX Indonesia (https://www.olx.co.id/).....	251
2. Bukalapak (https://www.bukalapak.com/)	260
3. Tokopedia (https://www.tokopedia.com/)	282
4. Zalora (https://www.zalora.co.id/).....	336
B. Sengketa Dalam Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	351
1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	356
2. Penegakan Hukum Konsumen	359
a. Konsekuensi Yuridis terhadap Pelanggaran Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen	359
b. Konsekuensi Non yuridis terhadap Pelanggaran Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen	359
c. Badan Perlindungan Konsumen Nasional.....	363
d. Penerapan Sanksi-sanksi.....	364
e. Hukum yang Berlaku dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi <i>E-commerce</i>	370
C. Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) Saat Ini.....	386

1. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	387
2. Prospek Pengaturan Alternatif Penyelesaian Sengketa <i>Online</i>	396
3. Penyelesaian Sengketa di Beberapa Toko <i>Online</i> Di Indonesia Saat Ini....	403
a. Penyelesaian Sengketa OLX Indonesia	404
b. Penyelesaian Sengketa Bukalapak	412
c. Penyelesaian Sengketa Tokopedia	415
d. Penyelesaian Sengketa Zalora.....	386
4. Implementasi Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dalam Penyelesaian Sengketa Online	423

BAB IV Kelemahan-Kelemahan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Di Indonesia Saat Ini.....427

A. Kelemahan Ketentuan Informasi Persyaratan Kontrak oleh Perusahaan <i>E-Commerce</i>	427
1. Kelemahan Pada Informasi Syarat Kontrak Mengarahkan pada Kontrak Baku yang Tidak Seimbang	427
2. Kelemahan Informasi Syarat Kontrak Berupa Sulit Diakses.....	433
3. Kelemahan Informasi Syarat Kontrak Berupa Tidak Lengkap Dan Tidak Jelas.....	436
B. Kelemahan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) Masih Belum Berkeadilan	440

1. Kelemahan Kesadaran dan Kepercayaan Konsumen.....	451
2. Kelemahan Jarak Jauh (<i>Great Distances</i>) antara Pengusaha dan Konsumen	454
3. Lemahnya Perlindungan Hukum.....	460
C. Kelemahan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	467
1. Melalui Lembaga Yang Bertugas Menyelesaikan Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha	470
2. Melalui Peradilan Yang Berada Di Lingkungan Peradilan Umum.....	474
D. Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 483 K/Pdt.Sus-BPSK/2018	477
E. Kelemahan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) Di Indonesia Saat Ini Masih Belum Berkeadilan	485
1. Kelemahan Perlindungan Hukum Yang Seharusnya Diatur Dalam Transaksi <i>E- Commerce</i>	494
a. Kelemahan Perlindungan Hukum Dari Sisi Pelaku Usaha	495
b. Kelemahan Perlindungan Hukum Dari Sisi Konsumen	496
c. Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Sisi Produk	496
2. Kelemahan Model Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	502
a. Kelemahan Penyelesaian Sengketa secara Damai	505
b. Kelemahan Penyelesaian Sengketa Adversarial	508

c. Kelemahan Penyelesaian Sengketa dengan <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i>	526
F. Kerancuan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	539
1. Kerancuan Regulasi	539
2. Kerancuan Proses Penyelesaian Sengketa	542
BAB V Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) Berbasis Nilai Keadilan	552
A. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan.....	552
B. Perbandingan Pengaturan di Beberapa Negara Tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan Informasi Syarat Kontrak Perdagangan Secara Elektronik.....	591
1. Negara Amerika	591
2. Negara China.....	597
3. Matriks Perbandingan Pengaturan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) Antara Negara Lain dengan Negara Indonesia	603
C. Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) Berbasis Nilai Keadilan.....	608
1. Rekonstruksi Nilai	608
2. Rekonstruksi Norma	611
3. Penemuan Teori Hukum Baru	613

BAB VI PENUTUP	614
A. Simpulan	614
B. Saran-Saran	618
C. Implikasi Kajian Disertasi.....	619
1. Implikasi Teoritis	619
2. Implikasi Praktis	619
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	